

Pengangguran di RI Disorot Media Asing

Dari Halaman 1

to get them jobs'.
Media Timur Tengah itu mengutip data survei Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) atau Yusof Ishak Institute yang berbasis di Singapura. Survei tersebut mencatat pemuda Indonesia menunjukkan sikap jauh lebih pesimistis terhadap ekonomi dan pemerintah dibandingkan dengan anak muda di Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Vietnam.
Dalam survei tersebut dikatakan hanya 58 persen pemuda Indonesia yang mengatakan mereka optimistis terhadap rencana ekonomi pemerintah. Sementara, di Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Vietnam, rata-rata mencapai 75 persen.

Kekecewaan itu, sambung Al Jazeera, memun-

cak dalam aksi protes mahasiswa yang membentuk gerakan Indonesia Gelap pada Februari lalu. Al Jazeera mengatakan para ekonom berpendapat ada beberapa penyebab anak muda Indonesia banyak yang menganggur, di antaranya undang-undang ketenagakerjaan yang kaku sehingga menyulitkan perekrutan. Kemudian, upah yang rendah sehingga tidak menarik bagi tenaga kerja berkualitas. Al Jazeera mengatakan, meski tingkat pengangguran nasional RI sekitar 5 persen, banyak pekerjaan yang tersedia bersifat tidak stabil dan bergaji kecil. Hal tersebut terlihat dari sekitar 56 persen pekerja berada di sektor informal yang rentan dan tanpa jaminan sosial.
"Pekerjaan yang layak juga tidak banyak tersedia, jadi orang beralih ke sektor informal yang produktivitas dan perlindungannya lebih rendah," ujar Ekonom CSIS Indonesia Adinova

Fauri.
Kendati tingkat pengangguran RI masih tinggi dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, Al Jazeera menyoroti pemerintah RI selama bertahun-tahun telah membuat beberapa kemajuan dalam mendorong lebih banyak kaum muda untuk bekerja.
Presiden Prabowo Subianto, sambung Al Jazeera, telah mengakui perlunya menciptakan lebih banyak lapangan kerja, membentuk gugus tugas untuk mengatasi pengangguran dan bernegosiasi tentang perdagangan dengan Presiden AS Donald Trump.
Prabowo menyambut baik dimulainya "era baru yang saling menguntungkan" bagi Indonesia dan AS, setelah Trump mengumumkan kesepakatan untuk menurunkan tarif barang-barang Indonesia dari 32 menjadi 19 persen. (cnni/js)

Jokowi Minta Pemeriksaan Ditunda

Dari Halaman 1

Jokowi, Rivai Kusumanegara saat dikonfirmasi, Selasa (22/7).
Rivai menyebut permintaan penundaan pemeriksaan itu sudah disampaikan ke kepolisian pada pekan lalu. Kata dia, ada dua opsi yang disampaikan dalam permintaan penundaan pemeriksaan tersebut.
"Yakni menunggu approval dokter atau Pak Jokowi diperiksa di kediaman sesuai ketentuan Pasal 113 KUHP," ucap dia.

Kendati demikian, kata Rivai, pihaknya masih belum mendapat jawaban dari penyidik terkait permintaan penundaan pemeriksaan itu.
"Sampai saat ini kami masih menunggu jawaban atas permohonan tersebut dan mudah-mudahan dalam minggu ini sudah mendapat jawabannya," tutur dia.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya tengah mengusut enam laporan polisi terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Dari enam laporan itu, salah satunya dilaporkan langsung oleh Jokowi.
Jokowi melayangkan laporan terkait dugaan

fitnah atau pencemaran nama baik buntut tuduhan ijazah palsu. Dalam laporan itu, Jokowi melaporkan soal dugaan pelanggaran Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP dan atau Pasal 305 Jo 51 ayat 1 UU ITE.
Teranyar, polisi telah menaikkan status laporan yang dilaayangkan Jokowi ke tahap penyidikan. Hal ini berdasarkan gelar perkara di mana penyidik menemukan ada unsur pidana di dalamnya.
Sedangkan untuk lima laporan lain, tiga di antaranya juga naik ke tahap penyidikan. Sedangkan dua laporan lainnya, dicabut oleh pihak pelapor. (cnni/js)

KPK Periksa Istri Topan Ginting

Dari Halaman 1

TOP yang tentu juga menjadi rumah saksi ISA," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Kantornya, Jakarta, Senin (21/7) malam.
Budi enggan memberi informasi apakah Isabella mengetahui asal-usul uang miliaran dan senjata api dimaksud.
"Dikonfirmasi terkait dengan temuan-temuan dalam kegiatan pengeledahan tersebut di antaranya terkait dengan uang yang ditemukan dan diamankan di rumah saudara TOP," imbuhnya.
KPK menggeledah rumah kediaman Topan Ginting pada awal Juli lalu. Dari sana, penyidik menyita uang senilai Rp2,8 miliar dan dua senjata api. Adapun dua senjata tersebut terdiri dari Pistol Baretta dengan amunisi 7 butir dan senapan angin dengan amunisi pelet dua pak.

Sebelum ini, KPK sudah lebih dulu menggeledah salah satu kantor yang tidak disebut detail dan menyita sejumlah dokumen diduga terkait perkara.
KPK sudah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka ialah Topan Obaja Putra Ginting; Kepala UPTD Gn. Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut merangkap PPK Rasuli Efendi Siregar; PPK Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumut Heliyanto.
Kemudian Direktur Utama PT Dalihan Natolu Grup (DNG) M. Akhiron Efendi Siregar dan Direktur PT Rona Na Mora (RN) M. Rayhan Dulasma Pilang.
Para tersangka sudah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK Cabang Gedung Merah Putih.
Kasus yang bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) ini berkaitan dengan Pemb-

gunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, yaitu Preservasi Jalan Sp. Kota Pinang - Gunung Tua - SP. Pal XI Tahun 2023 dengan nilai proyek Rp56,5 miliar; Preservasi Jalan Sp. Kota Pinang - Gunung Tua - Sp. Pal XI Tahun 2024 dengan nilai proyek Rp17,5 miliar.
Kemudian Rehabilitasi Jalan Sp. Kota Pinang - Gunung Tua - Sp. Pal XI dan penanganan longsor tahun 2025; serta Preservasi Jalan Sp. Kota Pinang - Gunung Tua - Sp. Pal XI tahun 2025.
Sedangkan untuk proyek pembangunan jalan di Satuan Kerja PJN Wilayah I Sumut terdiri dari Proyek Pembangunan Jalan Sipiongot batas Labusel dengan nilai proyek Rp96 miliar dan Proyek Pembangunan Jalan Hutaimbaru- Sipiongot dengan nilai proyek Rp61,8 miliar.
Total nilai proyek setidaknya sejumlah Rp231,8 miliar. KPK masih akan menelusuri dan mendalami proyek-proyek lainnya. (cnni/js)

Indonesia Darurat Kekerasan Terhadap Anak

Dari Halaman 1

menjadi peringatan serius bahwa perlindungan terhadap anak masih memiliki banyak celah.
"Kekerasan anak-anak ini sudah dalam posisi darurat," tegas Arifah saat konferensi pers perayaan Hari Anak Nasional di Gedung KemenPP-PA, Jakarta Pusat, Rabu (16/7).
Dia pun menjelaskan penyebab utama kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga berasal dari tiga faktor utama, yakni pola asuh yang keliru, penggunaan gawai yang berlebihan, dan lingkungan sekitar yang tidak mendukung

tumbuh kembang anak secara sehat.
Tak hanya soal pola asuh dan lingkungan, Arifah juga menyoroti kesiapan keluarga dalam menjalani peran sebagai orang tua. Ia menekankan, banyak kasus kekerasan pada anak berakar dari pernikahan usia dini yang minim kesiapan emosional maupun finansial.
"Salah satunya kesiapan sebuah keluarga menjadi orang tua. Angka pernikahan usia anak jadi faktor penyebab dan berdampak pada kekerasan [anak]," katanya.
Ia menambahkan, banyak pasangan muda yang menikah tanpa memahami sepenuhnya peran sebagai suami dan istri, apalagi sebagai orang tua.

Menurutnya, banyak anak-anak atau remaja yang baru saling kenal beberapa bulan saja sudah memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan.
"Padahal pengenalan butuh proses. Janganlah suami istri, saudara aja perlu dicocokkan bertahun-tahun. Jadi adaptasi dalam sebuah keluarga suami istri butuh waktu panjang," ujarnya.
Arifah juga menyoroti maraknya pernikahan usia dini yang menyebarkan dampak panjang, termasuk tingginya risiko anak mengalami stunting. Meski secara resmi pernikahan di bawah usia 19 tahun dilarang dan tidak tercatat di KUA, kenyataan di lapangan justru berbeda. (cnni/js)

Bobby Mediasi Pemkab Deliserdang dan Al-Washliyah

Dari Halaman 1

penggunaan aset secara bersama dan para siswa kembali belajar di kelas mulai Senin depan.
Pertemuan yang berlangsung di Aula Kantor Kepala Desa Petumbukan, Kecamatan Galang, Kabupaten Deliserdang, Rabu (16/7/2025), dihadiri Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan secara bold dari Jakarta, Wakil Bupati Lomlom Suwondo, Ketua PW Al-Washliyah Sumut Dedi Iskandar Batubara dan pimpinan Forkopimda kabupaten, serta Kepala Desa Petumbukan Zulhilfan Saragih.
Diketahui, gedung sekolah yang berada tidak jauh dari Kantor Desa Petumbukan tersebut merupakan aset Pemkab Deliserdang, yang berada di atas lahan milik Al-Washliyah. Akibat tarik-menarik penggunaan aset tersebut, sejak Senin (14/7), para siswa madrasah Al-Washliyah tidak dapat belajar seperti biasa di kelas, karena gedung sekolah tertutup rapat.
"Dari keterangan pihak Pemkab Deliserdang tadi, kita mengetahui bahwa sebenarnya persoalan ini tak perlu lagi kita sebut penyelesaian. Jadi bukan soal aturan, melainkan bagaimana aktivitas anak-anak kita mendapatkan pendidikan, itu yang penting. Apalagi pendidikan itu adalah sektor penting sebagaimana disampaikan Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto," jelas Bobby.
Menurutnya dalam permasalahan ini, prinsip berpikirnya adalah mencari win-win solution atau

solusi terbaik, bukan lagi siapa yang kalah atau menang. Jika ada, maka keduanya, baik Pemkab Deliserdang maupun Al-Washliyah, sama-sama menjadi menang. Sehingga prioritas utamanya adalah bagaimana siswa bisa kembali belajar di sekolah.
Serupa dalam diskusi itu, dijelaskan bahwa posisi gedung sekolah merupakan aset Pemkab Deliserdang, yang berdiri di atas lahan milik Al-Washliyah. Adapun bangunan yang ada, sejumlah 18 ruang belajar (rumbel), yang selama ini digunakan untuk Madrasah Tsanawiyah Al-Washliyah sebanyak 8 kelas, dan SMPN 2 Galang sebanyak 10 kelas.
Misalnya soal permohonan hibah dari Al-Washliyah ke Pemkab Deliserdang untuk melepas aset gedung, prosesnya belum bisa direalisasikan, menunggu pembangunan gedung baru oleh Pemkab Deliserdang, yang diperkirakan baru akan terwujud dua tahun mendatang. Termasuk pengurusan pinjam pakai yang dibatalkan karena dianggap tidak sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2016.
"Jadi bukan lagi pinjam pakai, kita patuhi Permendagri tersebut. Dan proses hibah kita minta tetap dijalankan. Soal pembangunan gedung baru SMPN 2 Galang, nanti kita upayakan untuk bantuan pembangunannya. Menunggu itu, kedua bagian pihak, baik Pemkab Deliserdang maupun Al Jam'iyatul Washliyah, bisa kembali menggunakan gedung sekolah yang sekarang secara

bersama-sama, bagian dua. Dan proses upaya bisa dimulai kapan saja Senin (21/7/2025) depan," jelas Bobby.
Menyanggapi hal itu, Ketua PW Al-Washliyah Sumut Dedi Iskandar Batubara menyambut baik saran solusi dari Gubernur dalam upaya menuntaskan permasalahan penyelesaian tersebut. Bahkan katanya, sudah ada kesepakatan sebelumnya untuk penggunaan ruang kelas, antara yang dibutuhkan Madrasah Al-Washliyah dan SMPN 2 Galang.
"Saya kira saran Beliau (Gubernur) itu sangat bijaksana. Intinya bukan persoalan punya siapa, tapi yang terpenting proses belajar mengajar. Kami menyadari, bahwa gedung itu bukan Al-Washliyah yang membangun. Tetapi kita memikirkan anak-anak kita," katanya.
Hasil pertemuan diskusi itu, disepakati bahwa penggunaan sekolah kembali, dan kedua pihak baik Pemkab Deliserdang maupun Al-Washliyah sama-sama bisa menggunakannya. Konsepnya adalah pemanfaatan bersama.
Usai pertemuan itu, Gubernur dan seluruh rombongan meninjau lokasi sekolah/madrasah. Sementara di depan gedung, para siswa dan orang tua sudah menunggu untuk meminta kepastian atas solusi penyelesaian ini.
Turut hadir sejumlah pimpinan OPD Pemprov Sumut, Kapolresta Deliserdang Kombes Pol Hendria Lesmana dan Anggota DPRD Deliserdang, serta pengurus PD Al-Washliyah Deliserdang dan perwakilan Forkopimda kabupaten. (A-05)

Tom Lembong Banding

Dari Halaman 1

Mushafi, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.
Zaid menuturkan banyak pertimbangan majelis hakim pengadilan tingkat pertama yang tidak sesuai dengan fakta hukum persidangan. Detail kejanggalan-kejanggalan tersebut nantinya akan dituangkan dalam memori banding.
"Kita sudah mengedarkan semua pertimbangan-pertimbangan majelis hakim dan tentu secara nalar hukum dan didasarkan pada pembuktian fakta persidangan, itu banyak yang tidak sesuai. Untuk itu kita mengajukan banding," kata Zaid.
Sejumlah poin yang dipermasalahkan di antaranya mengenai tak adanya niat jahat atau mens rea hingga kerugian keuangan negara.
"Tidak adanya mens rea, tidak adanya niat

jahat, tapi pak Tom dalam putusan pertama itu dikatakan secara bersama-sama melakukan tindak pidana," kata Zaid.
"Pertanyaan selanjutnya adalah apakah Pak Tom ini Menteri Perdagangan atau Direksi PT PPI (Perusahaan Perdagangan Indonesia)? Ataukah Menteri Perdagangan ini adalah pemegang sahamnya PT PPI?" lanjut Zaid lagi.
"PT PPI BUMN. Pemegang sahamnya adalah Menteri BUMN, bukan Pak Tom lembong selaku Menteri Perdagangan. Kenapa kerugian lebih bayar PT PPI terhadap perusahaan swasta gula rafinasi ini dimintakan pertanggungjawabannya kepada Pak Tom? Apa kausalitasnya? Apa korelasinya?" katanya.
Sebelumnya, Tom Lembong divonis dengan pidana 4,5 tahun penjara dan denda sebesar Rp750 juta subsider 6 bulan kurungan. Lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang ingin Tom dihukum dengan 7 tahun

penjara.
Hal memberatkan di balik hukuman tersebut adalah Tom terkesan bandedepankan sistem ekonomi kapitalis dibandingkan sistem demokrasi ekonomi dan Pancasila saat menerbitkan izin impor gula untuk delapan perusahaan swasta.
Tom saat menjabat Menteri Perdagangan disebut tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan asas kepastian hukum dan meletakkan hukum dengan ketentuan peraturan perundangan sebagai dasar pengambilan setiap kebijakan dalam pengendalian dan stabilitas harga di bidang perdagangan khususnya gula.
Lalu Tom disebut tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara akuntabel dan bertanggung jawab, bermanfaat dan adil dalam pengendalian dan stabilitas harga gula yang murah, terjangkau oleh masyarakat sebagai konsumen akhir atau kebutuhan bahan kebutuhan pokok berupa gula kristal putih. (cnni/js)

Realitas Getir

Dari Halaman 1

besar-besaran pada 2023, warga sekitar kawasan Kesawan dan sekitarnya mulai merasakan perubahan yang tidak nyaman. Salah satu yang paling menonjol adalah intensitas banjir yang meningkat saat hujan deras mengguyur kota. Kawasan seputar Jalan Pulau Pinang, Balai Kota, dan Jalan Stasiun sering tergenang. Drainase lama tak sanggup lagi menampung limpasan air yang dulu diserap tanah dan akar pohon di Lapangan Merdeka.
Kini, lapangan itu lebih mirip panggung beton. Rumput diganti lantai granit. Pohon-pohon tua ditebang. Tanah yang dulu "hidup" dan bernapas, sekarang ditutup rapat oleh perkerasan. Kota yang menolak air adalah kota yang menolak waras. Medan sedang menuju ke sana.
Kita sedang menyaksikan pengingkaran terhadap fungsi ekologis ruang publik. Alih-alih menata kota dengan prinsip keberlanjutan, mengambil kebijakan justru memilih jalan estetika semu - yang terlihat indah di brosur, tapi merusak dalam kenyataan.
Belum lagi soal kemacetan. Proyek revitalisasi yang memakan separuh area jalan dan parkir membuat mobilitas warga terganggu. Apalagi di jam sibuk atau saat ada event pemerintah. Jalan-jalan sekitar lapangan kerap macet karena ruang sirkulasi kendaraan berkurang, sementara akses publik tidak ditata ulang secara bijak. Pejalan kaki tersingkir, pengendara sepeda tak punya ruang aman, dan angkutan umum tak mendapat prioritas.
Masalah ini tidak berdiri sendiri. Ia lahir dari ketimpangan orientasi pembangunan yang lebih memertentangkan "tampilan" daripada fungsi. Kota seperti ingin jadi elitase, bukan rumah. Pemimpin kota seolah lupa bahwa sebuah ruang publik bukan hanya tentang menata, tapi juga tentang merawat keseimbangan antara manusia dan lingkungannya.
Ironisnya, proyek ini terus berjalan meski ditengarai penuh persoalan. Hingga hari ini, tidak terdengar langkah dari Inspektorat, BPK, BPKP, maupun Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menyelidiki potensi penyimpangan anggaran. Padahal nilainya fantastis, mencapai ratusan miliar rupiah. Jika rakyat kecil salah hitung lima ribu rupiah dalam dana bantuan, ia bisa dituduh korupsi. Tapi ketika proyek megabesar mengubah ruang hidup rakyat dan menimbulkan dampak nyata, semua diam.
Lapangan Merdeka seharusnya menjadi paru-paru kota. Tapi kini, ia menjadi paru-paru yang dicor. Kota kehilangan tempat bernapas, dan rakyat kehilangan ruang bernapas. Apakah ini yang kita sebut pembangunan? Ataukah ini hanya cara lain menyingkirkan rakyat demi kenyamanan segelintir elite? (*)

proyeksi bisnisnya berdasarkan operasi pabrik Kaliwungu-Kendal di masa mendatang," terang Manajemem POLY dikutip dari Keterbukaan Informasi, Senin (21/7).
Manajemen mengatakan penutupan permanen pabrik terjadi lantaran perusahaan menghadapi kondisi global yang sulit seperti kelebihan kapasitas global, kenaikan tarif ekspor ke Amerika Serikat (AS), dan kenaikan harga bahan baku.
Dari dalam negeri, perusahaan juga menghadapi kondisi yang sulit seperti ketidakjelasan penerapan bea anti-dumping, revisi peraturan importasi yang belum sesuai harapan industri sehingga menyebabkan lesunya permintaan produk industri.
"Sejumlah upaya saat ini masih berlangsung untuk menyelesaikan restrukturisasi utang dengan Kementerian Keuangan (Kemkeu) untuk mencapai kesepakatan akhir atas perbaikan proposal yang diajukan perseroan, tetapi proses ini kemungkinan membutuhkan waktu lebih lama untuk diselesaikan," kata perusahaan.
Perusahaan mengatakan selama ini telah menjaga dan memelihara fasilitas produksi pabrik kimia dan serat di Karawang agar dapat dioperasikan kembali. Namun, pemeliharaan fasilitas unit produksi pabrik tersebut membutuhkan biaya yang tinggi. Karenanya, perusahaan mendeklarasikan penutupan permanen.
"Penutupan unit produksi di Karawang akan mengakibatkan pendapatan penjualan tahunan perseroan tahun 2025 dan seterusnya menjadi lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya," katanya. (cnni/js)

Perusahaan Tekstil.....

Dari Halaman 1

Hidayah



Mengapa Anak Muda Masih Gelisah?

Dari Halaman 1

kita: angka menurun, tetapi keresahan meningkat.
Secara statistik, Indonesia memang tidak berada di jurang krisis. Namun, menurut proyeksi IMF, tingkat pengangguran Indonesia tahun ini mencapai 5,0%, tertinggi di ASEAN, bahkan menyaingi China. Lebih dari 7,2 juta orang masuk kategori pengangguran terbuka, dan lebih dari satu juta di antaranya lulusan universitas. Bahkan menurut laporan Al Jazeera, hampir 17% dari generasi muda usia 15-24 tahun masih menganggur.
Jawabannya ada pada kualitas dan relevansi pekerjaan yang tersedia. Sebagian besar pekerjaan yang menyerap tenaga kerja saat ini adalah sektor informal: ojek daring, penjual online, kerja serabutan. Mereka masuk kategori "bekerja" dalam statistik, namun dalam kenyataan hidup, mereka bergulat dengan ketidakpastian penghasilan, tanpa jaminan sosial atau jenjang karier. Di sinilah jebakan statistik itu muncul: tingkat pengangguran turun, tetapi angka kerja layak stagnan.
Masalah utama kita adalah mismatch antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Terlalu banyak lulusan yang tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Program vokasi masih minim. Di banyak daerah, lulusan SMK tidak dibekali keahlian yang bisa langsung diaplikasikan di lapangan. Sementara itu, lapangan kerja sektor formal makin sempit, terdesak oleh otomatisasi dan efisiensi industri.
Program seperti Kartu Prakerja patut diapresiasi, namun belum menyentuh akar masalah. Pelatihan daring tidak cukup untuk membentuk keterampilan praktis. Di sisi lain, insentif bagi industri untuk menyerap tenaga kerja terampil masih lemah. Iklim usaha belum cukup ramah bagi tumbuhnya sektor padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja muda.
Ada juga masalah distribusi: sebagian besar lapangan kerja formal tersentral di Jawa. Ketimpangan wilayah menciptakan urban overconcentration yang memperburuk pengangguran di kota-kota besar, sementara desa-desa kehilangan tenaga produktifnya.
Pertama, pemerintah harus mengalihkan fokus dari sekadar "menurunkan angka pengangguran" menjadi meningkatkan "kualitas pekerjaan". Ini berarti menekan dominasi sektor informal, menciptakan sistem perlindungan pekerja gig economy, dan mendorong tumbuhnya UMKM berbasis keterampilan.
Kedua, pendidikan vokasi harus direformasi besar-besaran. Kurikulum harus lebih responsif terhadap dinamika industri. Kemitraan antara kampus, SMK, dan dunia usaha perlu diformalkan melalui link and match yang konkret, bukan sekadar MoU seremonial.
Ketiga, investasi sektor padat karya harus diprioritaskan, bukan hanya mengejar proyek raksasa padat modal. Pabrik garmen, manufaktur lokal, pertanian modern—ini sektor-sektor yang bisa menyerap banyak tenaga kerja dengan pelatihan cepat. Akhirnya, negara harus berpihak. Bukan pada statistik, tapi pada manusia. Pada anak muda yang resah, yang bekerja serabutan, yang punya ijazah tapi tak punya penghasilan. Mereka tidak butuh belas kasihan, mereka butuh kejelasan jalan. Negara harus membuka jalan itu, bukan menutupinya dengan angka.